



RENJA TAHUN 2026



**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Otto Iskandardinata No. 19 Tasikmalaya Telp dan Fax (0265) 334111
Website : bpbd.tasikmalayakab.go.id Email : bpbd@Tasikmalayakab.go.id
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : Kep.000.8.1/1833/Sekre/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Bupati Tasikmalaya Nomor 0004 Tahun 2025 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 28 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

- tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 30);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dalam menyiapkan dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026;
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 26 Agustus 2025

Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN TASIKMALAYA,
RONI, A. Ks.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690901 199303 1 004



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : Kep.000.8.1/1833/Sekre/2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Penanggung Jawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Ketua : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik;
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi;
4. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran;
5. Kepala Sub Bagian Keuangan;
6. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
7. Perencana Ahli Pertama.

Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN TASIKMALAYA,

RONI, A.Ks.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690901 199303 1 004

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana kerja (RENJA).

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan penyusunan RAPBD maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.

Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Renstra PD, disusun dengan mempertimbangkan sasaran strategis PD dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD tahun 2026.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2026, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2026. Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan baik itu saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhir kata, semoga Dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2026 ini dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh para pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat terselenggara secara lebih terarah, efektif, efisien, akuntabel serta dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tasikmalaya, Agustus 2025

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikmalaya,



RONI, A.Ks

Pembina Utama Muda IV/c

NIP.19690901 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL.....iv

DAFTAR GAMBARv

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1. Latar Belakang..... I-1

1.2. Landasan Hukum I-3

1.3. Maksud Dan Tujuan I-7

1.4. Sistematika Penulisan I-7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN 2024 II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan
Capaian Renstra BPBD Kab. Tasikmalaya II-1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD II-12

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPBD . II-14

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... II-15

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-33

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPBD KABUPATEN TASIKMALAYA
..... III-1**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... III-1

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Tasikmalaya III-4

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KABUPATEN
TASIKMALAYA IV-1**

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Tahun 2026 IV-1

BAB V PENUTUP..... V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya II-2

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya II-13

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 II-16

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024 dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Tasikmalaya II-33

Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya III-6

Tabel 3.2 Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya..... III-7

Tabel 3.3 Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya..... III-7

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya III-8

Tabel 4.1 Sasaran dan Program/Kegiatan BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026..... IV-2

Tabel 4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2026..... IV-3

Tabel 4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 IV-7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tasikmalaya
..... I-3

Gambar 3.1 Keselarasan Asa Cita RPJMN Tahun 2025-2029
dengan Misi Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029
..... III-5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Renja Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran renja serta program, kegiatan dan sub kegiatan untuk satu tahun ke depan. Rencana kerja merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Renja dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja

Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

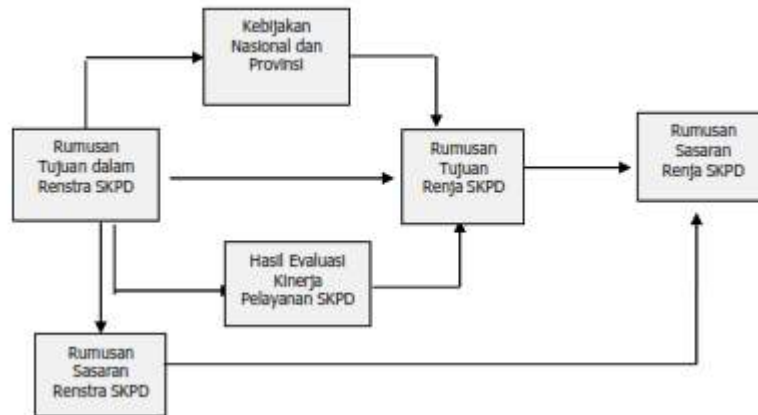
Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 disusun melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan yaitu tahapan perumusan Rancangan Renja dan Tahapan penyajian rancangan Renja. Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengolahan data dan informasi
- 2) Analisis gambaran pelayanan SKPD
- 3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD.
- 4) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 5) Telaahan terhadap terhadap rancangan awal RKPD
- 6) Perumusan tujuan dan sasaran.
- 7) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- 8) Perumusan kegiatan prioritas.
- 9) Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD.
- 10) Penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

11) Pembahasan forum SKPD.

Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah arahan menteri terkait. Tahapan proses penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Rencana Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 4) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 8) Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- 9) Undang-undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 20) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 ;

- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan bencana Daerah kabupaten/Kota;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah kabupaten/Kota;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- 28) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 29) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- 30) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 31) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 32) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 33) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
- 36) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya;
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 39) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2042;
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045;

- 41) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
- 42) Peraturan Bupati Tasikmlaya Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pementukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah dokumen perencanaan BPBD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Tasikmalaya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Tasikmalaya secara berkesinambungan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja BPBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2026 yaitu :

- 1) Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BPBD tahun 2026;
- 2) Sebagai pedoman pelaksanaan Program/Kegiatan BPBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan
- 3) Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 disusun dalam 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil

laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok- pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai Perumusan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, isu-isu penting tersebut mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,

seperti NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria), SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDGs (Sustainable Development Goals);

- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda disajikan dalam bentuk tabel;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan atau kecamatan yang disajikan dalam bentuk tabel.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaah yang menyangkut arah kebijakan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang program dan kegiatan serta pagu indikatif perangkat daerah.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut;
- d. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Kepala Daerah

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN 2024

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja BPBD tahun 2026 didasarkan pada Renstra BPBD tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2029.

Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan BPBD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Capaian Renstra BPBD Kab. Tasikmalaya

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan pencapaian Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Tasikmalaya

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja Capaian Indikator Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2025	Realisasi Target Kinerja Indikator Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Indikator Kinerja			Target Indikator Kinerja (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sampai dengan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1 05 01	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	47	47,68	46	74,1	161,09	47	0,00	0,00
	IKM	Poin	76	83	75	84,66	112,88	76	0	0,00
1 05 01 2.01	jumlah dokumen perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	65	39	13	13	100	13	55	84,62
1 05 01 2.01 01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15	9	3	3	100	3	13	86,67
1 05 01 2.01 07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	50	30	10	10	100	10	42	84,00

1 05 01 2.02	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan sesuai kebutuhan	Orang/Bulan	60	36	12	12	100	12	51	85,00
1 05 01 2.02 01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	60	36	12	12	100	12	51	85,00
1 05 01 2.06	cakupan pelayanan administrasi umum	Persentase	100%	100%	100%	100%	100	100%	85%	85,00
1 05 01 2.06 02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60	36	12	12	100	12	51	85,00
1 05 01 2.06 05	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	36	12	12	100	12	51	85,00
1 05 01 2.06 06	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	36	12	12	100	12	51	85,00

1 05 01 2.06 08	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	60	36	12	12	100	12	51	85,00
1 05 01 2.06 09	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	36	12	12	100	12	51	85,00
1 05 01 2.08	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Laporan	120	24	24	24	100	24	102	85,00
1 05 01 2.08 02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	36	12	12	100	12	51	85,00
1 05 01 2.08 04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	60	36	12	12	100	12	51	85,00
1 05 01 2.09	jumlah pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	Unit	260	52	52	52	100	52	217	83,46

1 05 01 2.09 01	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	180	108	36	36	100	36	153	85,00
1 05 01 2.09 09	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	12	4	4	100	4	16	80,00
1 05 01 2.09 10	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	60	36	12	12	100	12	48	80,00
1 05 03	persentase kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	97%	97,00
1 05 03 2.02	Persentase aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	155%	155,00
1 05 03 2.02 02	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kawasan	250	50	100	100	100	50	150	60,00

1	05	03	2.02	03	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan	60	36	12	12	100	12	51	85,00
1	05	03	2.02	10	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	250	100	700	700	100	100	800	320,00
1	05	03	2.03		jumlah laporan dalam pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Laporan	50	36	12	12	100	10	48	96,00
1	05	03	2.03	03	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	50	36	10	10	100	10	48	96,00
1	05	03	2.04		jumlah laporan penguatan kelembagaan dalam penanganan pasca bencana	Laporan	5	1	1	1	100	1	3	60,00

1 05 03 2.04 06	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	5	1	1	1	100	1	3	60,00
1 05 04	Persentase pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	40%	40,00
1 05 04 2.01	Persentase pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	100%	100	100%	40%	40,00
1 05 04 2.01 02	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	48	12	12	12	100	12	44	91,67

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan sebagai urusan penunjang pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh BPBD pada tahun 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.457.449.098. Anggaran 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya meliputi 3 (tiga) Program, 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 59.500.000,- . Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 58.200.000,- atau 97,82% yang terdiri dari sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 4.389.951.448,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 4.334.143.794,- atau 91,80% yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 475.615.650,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 460.657.225,- atau 109.2% yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitas Kunjungan Tamu dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 167.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 156.138.887,- atau 93,50% yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 970.382.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 923.630.629,- atau 95,18% yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

a. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 4.601.250.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 4.525.454.600,- atau 98,35% yang terdiri dari Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Penyusunan Rencana Kontijensi, Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.

b. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 1.300.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 781.312.450,- atau 60,10% yang terdiri dari Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

c. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 548.725.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 428.338.000,- atau 78,06% yang terdiri dari Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan dan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota.

3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 75.600.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 75.600.000,- atau 100% yang terdiri dari Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dari data di atas pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 secara keseluruhan target kinerja tercapai sebesar 100%, untuk tahun 2026 realisasi capaian target program/kegiatan direncanakan dapat tercapai 100%, oleh karena itu perlu adanya strategi yang tepat sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai sesuai rencana.

Secara Umum Rencana Kerja (Renja) BPBD Tahun 2026 memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang dimiliki, dengan berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan mengacu kepada RKPD. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra perangkat daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Tasikmalaya

Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah didasarkan pada sasaran strategis, berikut sasaran strategis yang menjadi ukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- 2. Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam penanggulangan bencana.

Untuk menjabarkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, dan target sasaran yang ditetapkan serta proyeksi untuk tahun 2025-2029, berikut tabelnya :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

No	Sasaran Strategis	Indikator (IKU/SPM/I KK/SDG's	Satuan	Target Renstra Daerah				Realisasi	Proyeksi Realisasi				Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi BPBD	Poin	59,10	60	61	62	59,10	60	61	62		
2	Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Poin	0,73	0,65	0,67	0,68	0,64	0,65	0,67	0,68		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPBD

BPBD Kabupaten Tasikmalaya tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana. Adapun isu-isu penting yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD, yaitu antara lain:

- 1) Belum dimilikinya secara keseluruhan dokumen rencana kontijensi untuk semua jenis bencana yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- 2) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur belum terpenuhi sesuai kebutuhan ideal organisasi;
- 3) Kompetensi SDM mengenai bencana yang masih minim;
- 4) Kegiatan mitigasi masih berfokus pada mitigasi non struktural seperti sosialisasi, pelatihan dan simulasi;
- 5) Jumlah Desa Tangguh Bencana yang belum menyeluruh di seluruh wilayah;
- 6) Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang masih belum sesuai standar yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

- 1) Memasukan Sub Kegiatan penyusunan Rencana Kontijensi dalam RKPD BPBD tahun 2026;
- 2) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur;
- 3) Meningkatkan Kompetensi SDM kebencanaan melalui bimtek dan pelatihan;
- 4) Melakukan mitigasi struktural baik itu pemasangan papan rambu bencana, papan informasi jalur evakuasi, pemasangan EWS;
- 5) Meningkatkan pembentukan Desa Tangguh Bencana;
- 6) Melakukan pengajuan untuk pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran di RKPD 2026;
- 7) Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
- 8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan

pembangunan;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2026 yang disampaikan telah dicermati oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menjelaskan keterkaitan sasaran dinas dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta tentang Rencana Kerja dan pendanaan (pagu indikatif) yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan. Proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata melibatkan personil-personil yang terlibat dalam Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah. Review Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 seperti terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				12.349.023.826	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				12.349.023.826	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.349.023.826	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.349.023.826	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12.349.023.826	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12.349.023.826	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kab. Tasikmalaya	Nilai Evaluasi SAKIP	76 Poin	6.963.060.366	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Kab. Tasikmalaya	Nilai Evaluasi SAKIP	76 Poin	6.963.060.366	

	DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM	85,5 Poin		DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM	85,5 Poin		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	100.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	100.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	60.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	60.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	40.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	40.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.177.060.366	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	5.177.060.366	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	5.177.060.366	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	5.177.060.366	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum BPBD	100%	411.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum BPBD	100%	411.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	150.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	40.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	40.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	6.000.000	

	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000	
	Penyelenggara Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	Penyelenggara Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam 12 Bulan	49 Unit	100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam 12 Bulan	49 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37 Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	37 Unit	50.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	50.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dalam 12 Bulan	24 Laporan	175.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dalam 12 Bulan	24 Laporan	175.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	105.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	105.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	70.000.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tasikmal aya	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dalam setahun	60 Unit	1.000.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tasikmal aya	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dalam setahun	60 Unit	1.000.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tasikmal aya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	220.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tasikmal aya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	220.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tasikmal aya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	580.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tasikmal aya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	580.000.000	

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmala ya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmala ya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 Unit	100.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Tasikmala ya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	20 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Tasikmala ya	Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	20 Unit	100.000.000	
	Program Penanggulangan Bencana	Kab. Tasikmal aya	Persentase Pelaksanaan Penanggulan gan Bencana	100%	4.014.437.460	Program Penanggulangan Bencana	Kab. Tasikmal aya	Persentase Pelaksanaan Penanggulan gan Bencana	100%	4.014.437.460	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmal aya	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	400.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmal aya	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	400.000.000	

	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kab. Tasikmalaya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	700 Orang	400.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kab. Tasikmalaya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	700 Orang	400.000.000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tasikmalaya	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	2.871.937.460	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tasikmalaya	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	2.871.937.460	

	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	205 Unit	200.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	205 Unit	200.000.000	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tasikmalaya	Jumlah aparaturnya dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	140 Orang	200.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tasikmalaya	Jumlah aparaturnya dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	140 Orang	200.000.000	

	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Laporan	1.771.937.460	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Laporan	1.771.937.460	

	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	400.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	400.000.000	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	5 Kawasan	200.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	5 Kawasan	200.000.000	

	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Tasikmalaya	Persentase Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	617.500.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Tasikmalaya	Persentase Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	617.500.000	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	50 Dokumen	25.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	50 Dokumen	25.000.000	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	800 Orang	592.500.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	800 Orang	592.500.000	

	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Tasikmalaya	Persentase ketersediaan sistem dasar Pemulihan Bencana	100%	125.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab. Tasikmalaya	Persentase ketersediaan sistem dasar Pemulihan Bencana	100%	125.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 Laporan	25.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 Laporan	25.000.000	
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000	

	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Tasikmalaya	Persentase Cakupan penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran selama setahun	100%	1.371.526.000	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Tasikmalaya	Persentase Cakupan penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran selama setahun	100%	1.371.526.000	
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam satu tahun	100%	1.271.526.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam satu tahun	100%	1.271.526.000	

	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan	100.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan	100.000.000	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	5 Orang	50.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	5 Orang	50.000.000	
	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan	1 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan	1 Dokumen	300.000.000	

			Penyelamata n (RISPKP)					Penyelamata n (RISPKP)			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Tasikmala ya	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulan gan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	108 Unit	821.526.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Tasikmala ya	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulan gan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	108 Unit	821.526.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Tasikmal aya	Jumlah Desa yang terbentuk Redkar	10 Desa	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Tasikmal aya	Jumlah Desa yang terbentuk Redkar	10 Desa	100.000.000	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Tasikmala ya	Jumlah Desa/Kelura han yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)	10 Desa/Kelu rahan	100.000.000	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Tasikmala ya	Jumlah Desa/Kelura han yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)	10 Desa/Kelu rahan	100.000.000	

			Setiap Tahunnya					Setiap Tahunnya			
--	--	--	-----------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan, dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan. Berikut tabel usulan pemangku kepentingan :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024 dari
Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Tasikmalaya

No	Program/Ke giatan	Lokasi	Indika tor Kinerj a	Besaran/Vo lume	Catat an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nihil				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BPBD KABUPATEN TASIKMALAYA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, bersinergi, holistik dan terintegrasi perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Salah satu perubahan yang terjadi dan mempengaruhi arah kebijakan di Daerah yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa adanya pengalihan beberapa kewenangan Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Provinsi, dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, dari Provinsi ke Pusat dan sebaliknya. Selain hal tersebut sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditetapkan beberapa peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Hal ini menyebabkan bertambahnya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan berubahnya skema pengelolaan keuangan daerah, sehingga dalam Rencana pembangunan tahunan dimaksud harus diwujudkan oleh RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Rencana Kerja BPBD Kabupaten

Tasikmalaya memperhatikan pelaksanaan pembangunan dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Sebagai pelaksana fungsi Perumusan Kebijakan Teknis dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tasikmalaya, maka BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewajiban untuk mensinergikan perencanaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya dengan perencanaan pembangunan Provinsi dan Nasional pada Tahun 2026.

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah 2025-2029, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita yang terdiri dari:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dari kedelapan misi di atas dapat dilihat bahwa urusan yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan tugas dan fungsi, merujuk kepada Misi Nomor 2, yaitu “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru.” dengan berfokus pada program Prioritas Nasional “Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif.” BPBD adalah bagian dari sistem pertahanan non-militer yang menjaga keamanan masyarakat dari ancaman bencana alam maupun non-alam. Penguatan sistem logistik bencana, kemandirian daerah dalam menghadapi risiko bencana, serta ketahanan air, pangan, dan energi sangat sejalan dengan cita-cita ini.

Dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan nasional yang diprioritaskan, RKPD Provinsi Jawa Barat 2025 telah menetapkan prioritas provinsi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia berkarakter;
- 2) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif;
- 3) Mengurangi disparitas pembangunan daerah perkotaan, pedesaan, serta miskin dan kaya;
- 4) Mewujudkan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan dan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance.

Berdasarkan arah kebijakan nasional dan provinsi tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat melakukan pembangunan berdasarkan visi, misi dan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Sehingga setiap pembangunan yang akan dilakukan berdasar atau sesuai dengan

arah pembangunan nasional, menjadikan Kabupaten Tasikmalaya berkontribusi aktif terhadap capaian pembangunan yang ditetapkan pada kebijakan Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJM Nasional Tahun 2025-2029.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Tasikmalaya

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029 yang hendak dicapai adalah “Tasikmalaya Yang Religius/Islami, Maju, Adil, dan Makmur.” Dalam mencapai visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, berakhlak serta berbudaya;
- 2) Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan pembangunan inklusif melalui pengentasan kemiskinan;
- 4) Mendorong percepatan pembangunan desa berbasis potensi local yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan didukung sector digital; dan
- 5) Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Misi ke-2 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2025-2029, yaitu Mewujudkan transformasi ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana serta Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran di Kabupaten Tasikmalaya.

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut maka BPBD mempunyai Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Capaiannya sesuai dengan Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Adapun Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu sebagai berikut :

- 1) Menurunnya Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Tasikmalaya

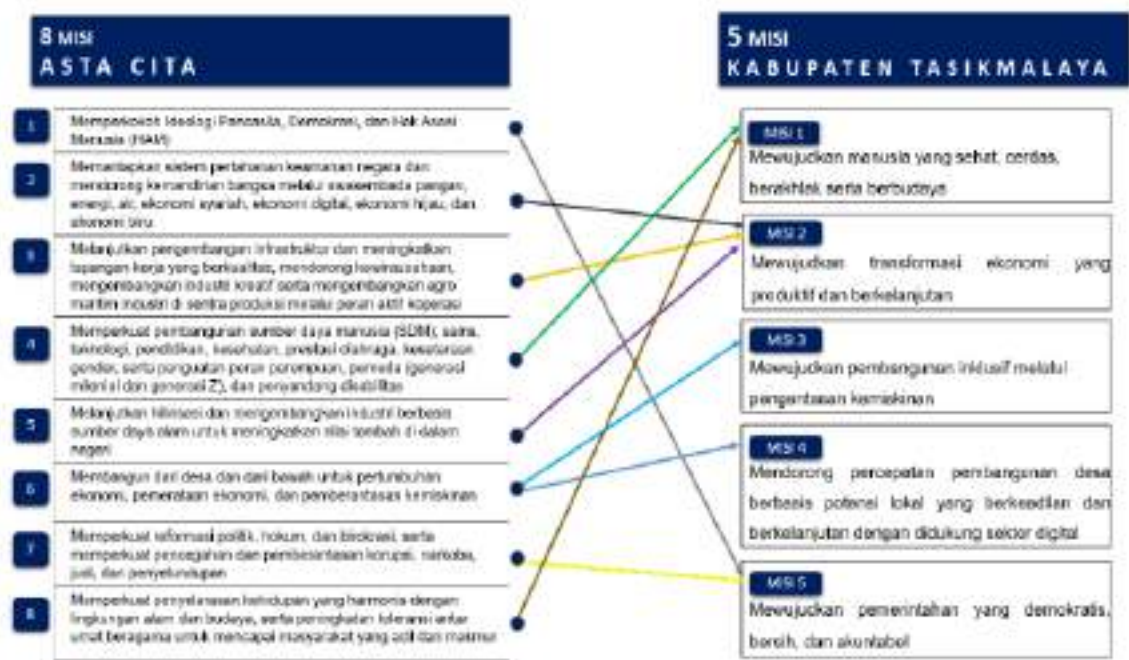
Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- 2) Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam penanggulangan bencana

Indikator sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai Reformasi Birokrasi BPBD;
- 2) Indeks Ketahanan Daerah.

Rumusan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang pada gambar berikut.



Gambar 3.1

Keselarasan Asa Cita RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Misi Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029

Memperhatikan hal yang ada, maka tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (Outcome)
1	T.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berkelanjutan didukung infratraktur yang andal	S.2.9 Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Andal, Berwawasan Lingkungan serta Tanggap Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi BPBD

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai prioritas pembangunan Daerah yaitu Prioritas ke 2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berkelanjutan didukung infratraktur yang andal dengan sasaran daerahnya yaitu Sasaran ke 2 Poin 9 Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur yang Andal, Berwawasan Lingkungan serta Tanggap Bencana oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai sasaran Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam penanggulangan bencana dengan indikator Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kebencanaan yang bisa menunjang akan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu dengan sasaran tersebut bertujuan pada Menurunnya Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Tasikmalaya dengan indikatornya yaitu Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026
1	Menurunnya Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Tasikmalaya	Indeks Risiko Bencana (IRB)	136,90 Poin

Dalam pencapaian tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2026 tersebut maka sasaran yang harus di laksanakan dapat terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi BPBD	61 Poin
2	Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,67 Poin

Maka dengan prioritas tujuan serta sasaran di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya menjadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) nya yang yang sesuai dengan yang tertuang pada RPJMD serta Renstra BPBD Tahun 2025-2029 tertuang pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi BPBD	61 Poin
2	Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,67 Poin

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KABUPATEN
TASIKMALAYA

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Tahun 2026

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tasikmalaya untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 serta Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Tasikmalaya tidak Dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran dan rencana kerja dan pendanaan BPBD Kab. Tasikmalaya Tahun 2026, diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Tasikmalaya.

Hasil perumusan program dan kegiatan BPBD Tahun 2026 disajikan dalam table dengan format sebagai berikut :

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan BPBD Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2026

NO	SASARAN PERANGKAT DAERAH	NAMA PROGRAM/KEGIATAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

		Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
		Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Sasaran tersebut dilaksanakan untuk menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 yaitu pada prioritas ke 2 “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berkelanjutan didukung infratraktur yang andal” yang tertuang pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas
Pembangunan Tahun 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	KET
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berkelanjutan didukung	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.014.437.460	

	infratraktur yang andal			
		Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000	
		Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	400.000.000	
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.871.937.460	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	200.000.000	
		Sub Kegiatan : Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	200.000.000	
		Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	100.000.000	
		Sub Kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.771.937.460	
		Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000	
		Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	
		Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	617.500.000	
		Sub Kegiatan : Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	
		Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	592.500.000	
		Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	125.000.000	

		Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	25.000.000	
		Sub Kegiatan : Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	100.000.000	
		Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.371.526.000	
		Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.271.526.000	
		Sub Kegiatan : Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
		Sub Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	50.000.000	
		Sub Kegiatan : Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	300.000.000	
		Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	821.526.000	
		Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100.000.000	
		Sub Kegiatan : Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	100.000.000	

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 4.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						12.349.023. 826							12.427.06 0.366	
	1	URUSAN PEMERINTAHA N WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.349.023. 826							12.427.06 0.366	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						12.349.023. 826							12.427.06 0.366	
1	36896	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA	Nilai Evaluasi SAKIP	80 Poin	74,10 Poin	75 Poin	76 Poin	6.963.060.3 66						77 Poin	7.093.060. 366	

1		N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Nilai IKM	87,5 Poin	84,66 Poin	85 Poin	85,5 Poin							86 Poin		
	1.05.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	-			19 Dokume n	100.000.000				Pening kata n Kualita s Lingku ngan Hidup dan Ketaha nan Terhad ap Bencan a	BPBD Kabupat en Tasikma laya		100.000.0 00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokume n	60.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	BPBD Kabupaten Tasikmalaya		60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	40.000.000	Kab. Tasikma laya, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)		Peningk ata n Kualitas Lingkun gan Hidup dan Ketahan an Terhada p Bencan a	BPBD Kabupat en Tasikmal aya		40.000.000	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawab an Keuangan yang Sesuai Aturan	-			100 Persenta se	5.177.060.36 6				Peningk ata n Kualitas Lingkun gan Hidup dan Ketahan an Terhada p Bencan a	BPBD Kabupat en Tasikmal aya	-	5.177.060. 366	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/b ulan	5.177.060.36 6	Kab. Tasikma laya, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)		Peningk ata n Kualitas Lingkun gan Hidup dan Ketahan an Terhada p Bencan a	BPBD Kabupat en Tasikmal aya		5.177.060. 366	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian dan Umum	-			100 Persentase	411.000.000				Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	BPBD Kabupaten Tasikmalaya	-	426.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				12 Paket	150.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	BPBD Kabupaten Tasikmalaya		165.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	40.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	BPBD Kabupaten Tasikmalaya		40.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	6.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	BPBD Kabupaten Tasikmalaya		6.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	15.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	BPBD Kabupaten Tasikmalaya		15.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	BPBD Kabupaten Tasikmalaya		200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam 12 Bulan	-			49 Unit	100.000.000				Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	BPBD Kabupaten Tasikmalaya	-	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				37 Unit	50.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	BPBD Kabupaten Tasikmalaya		100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	50.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	BPBD Kabupaten Tasikmalaya		100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dalam 12 Bulan	-			24 Laporan	175.000.000				Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	BPBD Kabupaten Tasikmalaya	24 Laporan	180.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	105.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap	BPBD Kabupaten Tasikmalaya		110.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

												Bencana				
	1.05.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	70.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	BPBD Kabupaten Tasikmalaya		70.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dalam setahun	-			36 Unit	1.000.000.000				Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	BPBD Kabupaten Tasikmalaya	-	1.010.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	220.000.000	Kab. Tasikma laya, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)		Peningk ata n Kualitas Lingkun gan Hidup dan Ketahan an Terhada p Bencan a	BPBD Kabupat en Tasikmal aya		220.000.00 0	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	580.000.000	Kab. Tasikma laya, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	Mengem ba ngkan Ekonom i Kerakya tan dan Investas i Berbasi s Kearifan Lingkun gan yang Tidak Eksploit atif Peningk ata n Kualitas Lingkun gan Hidup dan Ketahan an Terhada	BPBD Kabupat en Tasikmal aya		580.000.00 0	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH

												p Bencan a				
	1.05.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	100.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	BPBD Kabupaten Tasikmalaya		100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	100.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	BPBD Kabupaten Tasikmalaya		110.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	37626	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	-			100%	4.014.437.460						-	4.084.000.000	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-			100%	400.000.000			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	-	-	400.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				700 Orang	400.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	-		400.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-			100%	2.871.937.460			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	-	-	2.884.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di				205 Unit	200.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap	-		200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

			kawasan tempat tinggalnya									p Bencan a				
	1.05.03.2.0 2.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				140 Orang	200.000.000	Kab. Tasikm laya, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	Peningk ata n Kualitas Lingkun gan Hidup dan Ketahan an Terhada p Bencan a	-		220.000.00 0	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 2.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokume n	100.000.000	Kab. Tasikm laya, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	Peningk ata n Kualitas Lingkun gan Hidup dan Ketahan an Terhada p Bencan a	-		100.000.00 0	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.03.2.0 2.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	1.771.937.460	Kab. Tasikma laya, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	Peningk ata n Kualitas Lingkun gan Hidup dan Ketahan an Terhada p Bencan a	-		1.764.000. 000	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 2.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokume n	400.000.000	Kab. Tasikma laya, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	Mengem ba ngkan Ekonom i Kerakya tan dan Investas i Berbasi s Kearifan Lingkun gan yang Tidak Eksploit atif Peningk ata n Kualitas Lingkun gan Hidup dan Ketahan	-		400.000.000	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH

												an Terhada p Bencan a				
	1.05.03.2.0 2.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				5 Kawasan	200.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	-		200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-			100%	617.500.000			-	Menge mba nkan Ekono mi Keraky atan dan Investa si Berbasi s Kearifa n Lingku ngan yang Tidak Eksploi tatif Pening kata n Kualita s Lingku ngan Hidup dan Ketaha nan Terhad ap Bencan a	-	-	625.000.000	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														

			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				50 Dokumen	25.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	-		25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				800 Orang	592.500.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap	-		600.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

												p Bencan a				
	1.05.03.2.0 4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Pengembangan Sistem Pemulihaan Bencana	-			100%	125.000.000			-	Menge mba ngkan Ekono mi Keraky atan dan Investa si Berbasi s Kearifa n Lingku ngan yang Tidak Eksploi tatif Pening kata n Kualita s Lingku ngan Hidup dan Ketaha nan Terhad ap Bencan a	-	-	175.000.0 00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH

	1.05.03.2.0 4.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana														
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				12 Laporan	25.000.000	Kab. Tasikm laya, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	Mengem ba ngkan Ekonom i Kerakya tan dan Investas i Berbasi s Kearifan Lingkun gan yang Tidak Eksplait atif Peningk ata n Kualitas Lingkun gan Hidup dan Ketahan an Terhada p Bencan a	-		25.000.000	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.0 4.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														

			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	100.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	-		150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3	37991	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran selama setahun	-			100%	1.371.526.000						-	1.250.000.000	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam satu tahun	-			100%	1.271.526.000			-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	-	-	1.150.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														

			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	100.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	-		100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.0 1.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				5 Orang	50.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	-		50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.0 1.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)														

			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				1 Dokumen	300.000.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap Bencana	-		-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.0 1.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai				108 Unit	821.526.000	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Terhadap	-		1.000.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

			Standar Teknis Terkait									p Bencan a				
	1.05.04.2.0 4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Desa yang Terbentuk Redkar	-			10 Desa	100.000.000			-	Pening kata n Kualita s Lingku ngan Hidup dan Ketaha nan Terhad ap Bencan a	-	-	100.000.0 00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.04.2.0 4.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				10 Desa/Ke lu rahan	100.000.000	Kab. Tasikma laya, Semua Kecamat an, Semua Kel/Des a	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	Peningk ata n Kualitas Lingkun gan Hidup dan Ketahan an Terhada p Bencan a	-		100.000.00 0	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H							12.349.023. 826							12.427.06 0.366	

BAB V PENUTUP

A. CATATAN PENTING

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah Program Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja perangkat daerah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Dengan demikian, diharapkan penyusunan Renja dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berjalan dengan baik, dan juga dapat mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan

keuangan daerah di Kabupaten Tasikmalaya di tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga diharapkan tanggapan dan saran dari semua pihak untuk memperbaikannya.

B. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- 1) Seluruh aparatur di lingkungan BPBD Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 secara efektif dan efisien;
- 2) Renja BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2026 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- 3) Tata cara penyusunan Renja BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan

- 4) Renja BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, selanjutnya Renja Tahun 2026 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2026.

Tasikmalaya, Agustus 2025

Plt. Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tasikmalaya,



RONI, A.Ks

Pembina Utama Muda IV/c

NIP.19690901 199303 1 004



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH